LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Jalan Adi Sucipto No. 2 A Putussibau Kode Pos 78715 Telpon/Fax: (0567) 21205,
WA: 081280366798, Website: disnakertrans.kapuashulukab.go.id,
E-mail: disnakerintranskabkh@gmail.com

KAPUAS HULU HEBAT!

KATA PENGANTAR

Sebagai sebuah organisasi, Instansi Pemerintah semakin dituntut untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai penyampaian/komunikasi capaian kinerja dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau Kegagalan Kinerja.

Pelaporan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang isinya adalah penjelasan mengenai kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lkjIp).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lkjIp) merupakan salah satu instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memenuhi Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Adapun maksud disusunnya lkjIP Tahun 2023 ini adalah :

1) Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.

2) Sebagai wujud pertanggungjawaban suatu organisasi Instansi Pemerintah kepada pemberi wewenang atau pemberi mandat.
3) Sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.
4) Sebagai media informasi tentang sejauh mana pelaksanaan prinsip – prinsip good governance termasuk penerapan fungsi – fungsi manajemen secara benar pada instansi yang bersangkutan.

Tidak semua rencana dapat berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu melalui perbaikan penerapan fungsi – fungsi manajemen sesuai aturan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan pencapaian kinerja, hingga dapat mengetahui/mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan lingkungannya terhadap organisasi Instansi Pemerintah.

Putussibau, Maret 2023
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199003 2 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lkjlp) Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai sasaran strategis yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disusun melalui pengukuran indikator kinerja Rencana Strategis yang sudah d tetapkan Tahun 2021 – 2026. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam dokumen-dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Berikut Realisasi pencapaian target sebagaimana di bawah ini :

Tabel 1.1

Pencapaian Kinerja

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
1	Meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	4,78%	10.78%	225.25%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	13,40%	60.64%	452.54%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	13,02%	13,18%	101,23%	Sangat Berhasil

4	Meningkatnya Penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	B	B	100,00%	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Perangkat Daerah	95,50	93,64	98,05%	Sangat Berhasil
				Rata-rata capaian kinerja	195.47%	Sangat Berhasil

Putussibau, Maret 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199003 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Gambaran Umum 1

1. Pendahuluan 1

2. Susunan Organisasi 2

3. Tugas dan Fungsi 3

4. Sumber daya Aparatur 15

5. Sumber daya Keuangan 18

6. Sarana dan Prasarana 19

B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) 19

BAB II PERENCANA KINERJA **23**

A. Rencana Strategis 23

1. Visi 24

2. Misi 25

3. Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 27

B. Perjanjian Kinerja 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **31**

A. Capaian Kinerja Organisasi 31

B. Realisasi Anggaran 62

BAB IV PENUTUP **70**

LAMPIRAN **71**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 ASN Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Penempatan..... 16
Tabel 1.2 ASN Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Jejang Pendidikan 16
Tabel 1.3 ASN Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Jejang Pendidikan 17
Tabel 1.4 ASN Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Jenis Jabatan 17
Tabel 1.5 Tenaga Kontrak Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 18
Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2023 19
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Stargis beserta Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Tahun 2023..... 27
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.... 29
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.... 30
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.... 33
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran IKU Tahun 2023..... 34

Tabel 3.3 Capaian Kinerja IKU Tahun 2023..... 34
Tabel 3.4 Capaian kinerja sasaran meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan tahun 2023..... 35
Tabel 3.5 PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha dikabupaten kapuas hulu (miliar rupiah) tahun 2021-2023..... 35
Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penguna sumber daya tahun 2023..... 36
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja sasaran meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan tahun 2021 dan tahun 2023..... 37
Tabel 3.8 Perbandingan realisasi Kinerja sasaran meningkatkan PDRB sektor industry pengolahan tahun 2023 dengan target akhir renstra 38
Tabel 3.9 Capaian kinerja sasaran meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja tahun 2023..... 40
Tabel 3.10 Peserta Pelatihan dan Pencari Kerja yang terdaftar tahun 2023..... 41
Tabel 3.11 Analisis atas efisiensi penguna sumber daya tahun 2023..... 41
Tabel 3.12 Realisasi Kinerja sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja tahun 2021 dan tahun 2023..... 42
Tabel 3.13 Peserta Pelatihan dan Pencari Kerja yang terdaftar tahun 2021 sampai dengan 2023..... 43
Tabel 3.14 Perbandingan realisasi Kinerja sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja tahun 2023 dengan target akhir renstra 44
Tabel 3.15 Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi tahun 2023..... 45
Tabel 3.16 Jumlah KK yang mandiri pada transmigrasi tahun 2021-2023..... 46
Tabel 3.17 Analisis atas efisiensi penguna sumber daya tahun 2023..... 47

Tabel 3.18 Realisasi Kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi tahun 2021 dan tahun 2023..... 48
Tabel 3.19 Jumlah KK yang mandiri pada transmigrasi tahun 2021-2023..... 49
Tabel 3.20 Perbandingan realisasi Kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi tahun 2023 dengan target akhir renstra 50
Tabel 3.21 Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023..... 52
Tabel 3.22 Analisis atas efisiensi penguna sumber daya tahun 2023..... 53
Tabel 3.23 Realisasi Kinerja sasaran meningkatnya Implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas kinerja peemerintah daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023..... 54
Tabel 3.24 Perbandingan realisasi Kinerja sasaran meningkatnya implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi Dan akutabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2023 dengan target akhir renstra tahun 2026..... 55
Tabel 3.25 Capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas pelayanan publik perangkat daerah tahun 2023..... 57
Tabel 3.26 Hasil Survei kepuasan Masrakat terhadap pelayanan pembuatan kartu AK-1 Tahun 2023..... 58
Tabel 3.27 Analisis atas efisiensi penguna sumber daya tahun 2023..... 58
Tabel 3.28 Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2021 dan tahun 2023..... 59

Tabel 3.29 Perbandingan realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2023 dengan target akhir renstra 61
Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023..... 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi…. 3
Gambar 3.1 Perkembangan Realisasi dan Capain Kinerja sasaran meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan tahun 2021 sampai dengan 2023…. 37
Gambar 3.2 Perkembangan Realisasi dan Capain Kinerja sasaran meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2021 sampai dengan 2023…. 42
Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi dan Capain Kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi tahun 2021 sampai dengan 2023…. 48
Gambar 3.4 Perkembangan Realisasi Nilai Sakip 2021 sampai dengan 2023…. 54
Gambar 3.5 Perkembangan Realisasi dan Capain Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2021 sampai dengan 2023…. 61

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, merupakan media untuk mengeksplorasi sejauh mana Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu bergerak untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan di Bidang Tenaga kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi, maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Kinerjanya diukur berdasarkan kontribusi yang dihasilkan dalam menunjang tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara ekplisit maupun implisit terdapat beberapa hal yang menguatkan alasan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu wajib memenuhi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diantaranya :

1) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban mempertanggungjawabkan semua Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, Hal terpenting dari latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yang baik.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
   a. Subbag Umum dan Aparatur;
   b. Subbag Keuangan; dan
   c. Subbag Program.
3. Bidang Tenaga Kerja;
4. Bidang Perindustrian; dan
5. Bidang Transmigrasi.

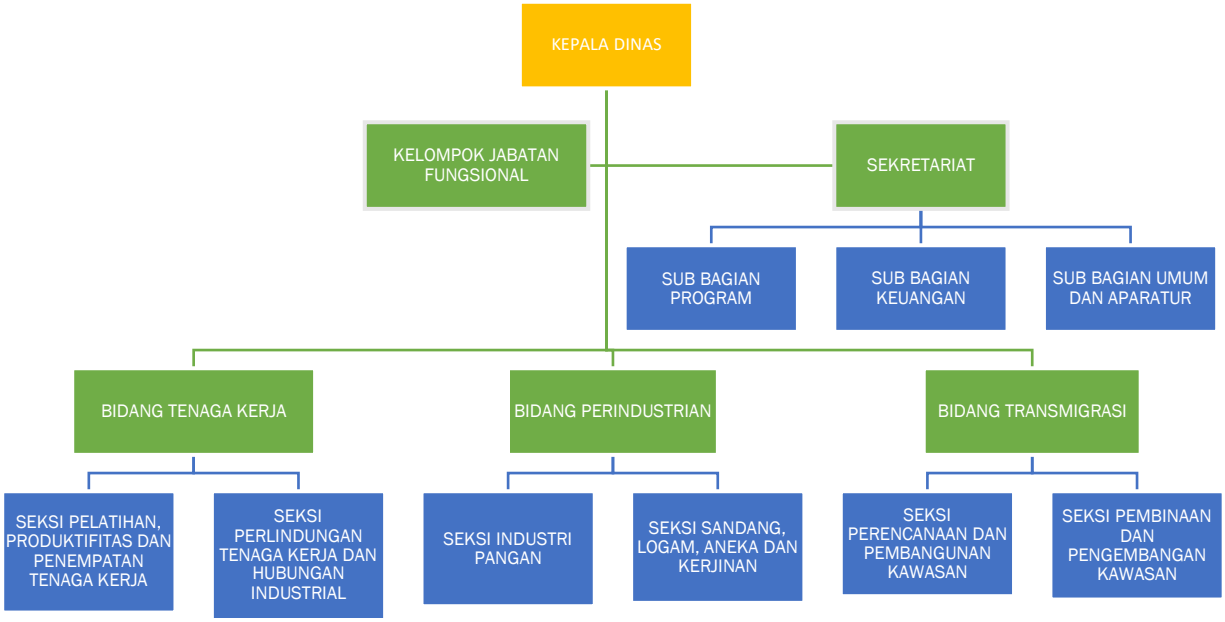

GAMBAR 1. Struktur Organisasi

3. Tugas dan Fungsi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan reorganisasi perangkat Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 58 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi melaksanakan fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;

b) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
d) pelaksanaan administrasi dinas;
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun Tugas dan Fungsi dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas;**

   Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

   - penetapan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
   - pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi dengan instansi lainnya;
   - penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
   - pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
   - pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;

- pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi secara periodik; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris ;

Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- penyusunan program kerja Sekretariat;
- pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A). Sub bagian Umum dan Aparatur;

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas.

melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;

- penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- pengelolaan barang milik Dinas;
- pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B). Sub Bagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat di bidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- penyusunan neraca, Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
- penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C). Sub Bagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Dinas.

Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tenaga Kerja;

Bidang Tenaga Kerja, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tenaga Kerja melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana operasional Bidang Tenaga Kerja;
- penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Tenaga Kerja;
- pelayanan pelatihan kerja dan produktivitas kerja;

- pelayanan penempatan tenaga kerja;
- perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial;
- pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja;
- pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Tenaga Kerja secara periodik;
- pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja secara periodik; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A). Seksi Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja;

Seksi Pelatihan, Produktifitas, dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bidang Tenaga Kerja dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas kerja dan penempatan tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja melaksanakan fungsi :

- penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja;
- penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan kerja dan produktivitas kerja;
- pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi;
- pelayanan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta pembinaan lembaga pelatihan kerja;
- fasilitasi konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten;
- pelayanan antar kerja;
- penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

- pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten;
- perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten;
- penerbitan perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas SeksiPelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B). Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial.

Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tenaga Kerja dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
- penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
- pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten;
- penyusunan bahan penetapan upah minimum Kabupaten dan sektoral;

- pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan lembaga kerjasama bipatrit;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Bidang Perindustrian;

Bidang Perindustrian, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana operasional Bidang Perindustrian;
- penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perindustrian;
- penetapan rencana pembangunan industri Daerah Kabupaten;
- pembinaan dan pengembangan industri pangan;
- pembinaan dan pengembangan industri sandang, logam, aneka, dan kerajinan;
- pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian;
- pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perindustrian secara periodik;
- pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian secara periodik; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A). Seksi Industri Pangan; dan

Seksi Industri Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
industri pangan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Industri Pangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Pangan;
- penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan Industri Pangan;
- fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri;
- pengembangan kemitraan dan pendampingan industri pangan;
- fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi serta kreatifitas industri pangan;
- fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standarisasi industri pangan;
- fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sentra industri pangan;
- fasilitasi pemberiaan informasi, promosi, dan pemasaran industri pangan;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Pangan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B). Seksi Industri Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan

Seksi Industri Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perindustrian

dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri sandang, logam, aneka dan kerajinan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Industri Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan ;
- penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan Industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- pengembangan kemitraan dan pendampingan industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam, teknologi, kreativitas dan inovasi industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standarisasi industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sentra industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- fasilitasi pemberiaan informasi, promosi, dan pemasaran industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas SeksiIndustri Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Transmigrasi;

Bidang Transmigrasi, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan di Bidang Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana operasional Bidang Transmigrasi;
- penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Transmigrasi;
- penyusunan rencana kawasan transmigrasi;
- pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi;
- pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Transmigrasi;
- pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Transmigrasi secara periodik;
- pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Transmigrasi secara periodik; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A). Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Transmigrasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

- penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi;
- pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah Kabupaten;
- pengusulan Rencana Kawasan Transmigrasi;
- penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas SeksiPerencanaan dan Pembangunan Kawasan transmigrasi; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B). Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas membantu kepala Bidang Transmigrasi dalam pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahap kemandirian. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi;
- penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau pelatihan pada satuan permukiman transmigrasi tahap kemandirian;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan UPT akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber Daya Manusia merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Jumlah pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 berjumlah 28 orang, Pegawai PPPK berjumlah 2 Orang, dan Tenaga Kontrak berjumlah 15 Orang. Data Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dapat dilihat di Tabel Berikut :

Tabel 1.1

ASN Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Berdasarkan Penempatan

No	Bidang/Urusan	PNS	PPPK	TENAGA KONTRAK	Jumlah	%
1	Sekretariat	10	2	5	17	37,38%
2	Tenaga Kerja	4	-	4	8	17,78%
3	Perindustrian	7	-	4	11	24,44%
4	Transmigrasi	7	-	2	9	20,20%
Jumlah		**28**	**2**	**15**	**45**	**100,00%**

source data : bagian umum dan aparatur disnakerintrans Tahun 2023

Tabel 1.2

ASN Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Berdasarkan Jejang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	Sekolah Dasar (SD)	0	0,00%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0,00%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8	26,67%
4	Diploma II (D-2)	0	0,00%
5	Diploma III (D-3)	2	6,67%
6	Sarjana Strata Satu (S-1)	16	53,33%
7	Sarjana Stara Dua (S-2)	4	13,33%
Jumlah		**30**	**100,00%**

source data : bagian umum dan aparatur disnakerintrans Tahun 2023

Tabel 1.3

ASN Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah	%
1	Pembina Utama Muda /IV c	1	3,33%
2	Pembina Tk. I/IV b	1	3,33%
3	Pembina /IV a	3	10,00%
4	Penata Tk. I / III d	8	26,67%
5	Penata / III c	2	6,67%
6	Penata Muda Tk. I / III b	4	13,33%
7	Penata Muda / III a	7	23,33%
8	Pengatur Tk.I / II d	0	0,00%
9	Pengatur/ II c	2	6,67%
10	Pengatur Muda TK. I / II b	0	0,00%
11	Pengatur Muda / II a	0	0,00%
12	Golongan VII	2	6,67%
Jumlah		**30**	**100,00%**

source data : bagian umum dan aparatur disnakerintrans Tahun 2023

Tabel 1.4

ASN Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah	%
1	Struktural	5	16,67%
2	Fungsional Tertentu	10	33,33%
3	Fungsional Umum	15	50,00%
Jumlah		**30**	**100,00%**

source data : bagian umum dan aparatur disnakerintrans Tahun 2023

Tabel 1.5

Tenaga Kontrak Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	5	33,33%
4	Diploma II (D-2)	-	-
5	Diploma III (D-3)	2	13,33%
6	Sarjana Strata Satu (S-1)	8	53,33%
7	Sarjana Stara Dua (S-2)	-	-
Jumlah		**15**	**100,00%**

source data : bagian umum dan aparatur disnakerintrans Tahun 2023

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan merupakan bagian faktor pendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan kerja Dinas Tenaga Kerja, perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Kapuas Hulu.

Anggaran dinas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran **2023** bersumber dari dana APBD Murni sebesar **Rp. 6.264.035.530** *(Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)* dan dilakukan Perubahan Anggaran sebesar **Rp. 7.077.908.586** *(Tujuh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)* dengan Realisasi Anggaran Sebesar **Rp. 6.748.111.294** *(Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sebelas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)* dengan Serapan Anggaran sebesar **95,34%** *(Sembilan Puluh Lima Koma Tiga Puluh Empat Pesen)*.

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.6

Sarana dan Prasarana

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
-	-	-	-

source data : bagian umum dan aparatur disnakerintrans Tahun 2023

B. PERMASALAHAN UATAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasiakan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, OPD, dan Lembaga atau Instansi diluar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika didalam organiasasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1) Angka pengangguran masih cukup tinggi yang disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat;
2) Dukungan personel yang kurang memadai dalam hal jumlah terutama personel yang berkaitan dengan pendataan tenaga Kerja;
3) Rendahnya kualitas calon TPA dan TPS yang ditempatkan di lokasi transmigrasi serta Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik (jejaring atau kerjasama, kejuruan unggulan);
4) Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial serta pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan kerja masih kurang;
5) Masih banyaknya jumlah perselisihan hubungan industrial (Perselisihan Hak dan Kepentingan) serta kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha. Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam Jamsostek (sekarang BPJS – Ketenagakerjaan);
6) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja serta kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar;

7) Sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai serta Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal;
8) Besarnya potensi komoditi unggulan, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang belum dikembangkan secara optimal. Minimnya diversifikasi serta rendahnya kualitas dan daya saing mayoritas produk industri kecil serta minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha industri kecil dan menengah;
9) Belum optimalnya fasilitasi yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan serta belum optimalnya pengembangan industri berbasis sentra dan klaster.
10) Minimnya perlindungan HKI dan standardisasi produk industri serta disparitas dan fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi;
11) Adanya era perdagangan bebas yang membuka pintu masuk produk-produk import sehingga menambah ketatnya persaingan produk-produk perindustrian; dan
12) Jumlah sumber daya aparatur pembina industri yang sangat minim sehingga berpotensi tidak mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah:

1) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru;
2) Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang harmonis;

3) Pembinaan lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi (SKKNI) dan penguatan sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
4) Penyediaan informasi ketenaga kerjaan berbasis IT;
5) Perbaikan syarat-syarat kerja (PP, PK, dan PKB) dan sistem pengupahan sesuai perundang-undangan;
6) Mendorong pembentukan dan berfungsinya LKSB serta Serikat Pekerja; dan
7) Perlunya Pelayanan Wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan berbasis IT.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektor Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Visi, Misi Bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu terpilih Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun 2021-2026.

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan Program atau kegiatan tahunan yang masuk dalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas, yang dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (RENJA PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

mendukung Visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita - cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. usaha - usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Berikut visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam RPJMD 2021-2026.

"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL"

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dilaksanakan pada periode pembangunan 2021-2026. Sebagai upaya dalam memberikan arah dan fokus pembangunan secara berkelanjutan, dibutuhkan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin melalui sebuah perencanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung lima elemen utama dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil. Sebagaimana dijabarkan pada penjelasan dibawah ini :

1. **Harmonis :** Mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai – nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
2. **Energik :** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang terdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. **Berdaya Saing :** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan;
4. **Amanah :** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintah yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. **Terampil :** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dari 5 misi Kabupaten Kapuas Hulu yang tercantum pada RPJMD, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mendukung misi ke 2, 3 dan misi ke 4 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
2. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;

3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Adapun tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Tenaga Kerja, perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama Perubahan

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi tahun 2023

Misi	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama
Misi ke 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;	Meningkatkan PDRB sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan
	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif
Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang memiliki daya saing	Meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Warga Transmigrasi	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri

Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Perangkat Daerah

source data : bagian program disnakerintrans tahun 2023

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen kontrak kerja antara suatu Organisasi, Penyusunan Dokumen Perjanjian kinerja mengacu pada dokumen Rencana Strategis/Rencana Kerja Tahunan serta Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA)/dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun pelaksanan Anggaran.

Dinas Tenaga Kerja, Peridustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,78
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	13,40
3	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	13,02
4	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	26,10
		Predikat SAKIP	BB
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah	95.50

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.231.858.030	APBD
2	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	42.988.900	APBD
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	18.036.500	APBD
4	Program Hubungan Industrial	38.975.000	APBD
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	830.938.700	APBD
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	50.626.400	APBD
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	50.612.000	APBD
JUMLAH		6.264.035.530	APBD

source data : bagian program disnakerintrans tanggal 28 februari 2023

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,78
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	13,40
3	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	13,02
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah	95.50

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.541.878.886	APBD
2	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	42.988.900	APBD
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	18.036.500	APBD
4	Program Hubungan Industrial	38.975.000	APBD
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.075.938.700	APBD
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	227.339.600	APBD
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	132.751.000	APBD
JUMLAH		7.077.908.586	APBD

source data : bagian program disnakerintrans tanggal 06 november 2023

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud nyata organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu media pelaporan (LKjIP). Penyusunan LKjIP ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana strategis.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan target kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam bab ini dijelaskan tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Adapun metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Formula pengukuran kinerja dengan membandingkan rencana dan realisasi menggunakan penghitungan sebagai berikut :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Rencana} x\ 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} x\ 100\%$$

Atau

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{(2\ x\ Rencana) - Realisasi}{Rencana} x\ 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran. Pengukuran ini bermanfaat untuk pembelajaran dan evaluasi atas kinerja, disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

1. 85 - 100 : Sangat Berhasil
2. 70 ≤ 85 : Berhasil
3. 55 ≤ 70 : Cukup Berhasil
4. ≥ 55 : Tidak Berhasil

Berikut hasil analisis pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2023. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
1	Meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	4,78%	10.78%	225.25%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	13,40%	60.64%	452.54%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	13,02%	13,18%	101,23%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	B	B	100,00%	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Perangkat Daerah	95,50	93,64	98,05%	Sangat Berhasil
				Rata-rata capaian kinerja	**195.47%**	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran IKU Tahun 2023

No	Kriteria Penilaian	Jumlah Sasaran IKU	Capaian (%)
1.	Sangat Berhasil	5	100,00%
2.	Berhasil	-	-
3.	Cukup Berhasil	-	-
4.	Tidak Berhasil	-	-

Tabel 3.3

Capaian Kinerja IKU Tahun 2023

No	Kriteria Penilaian	Jumlah IKU	Capaian (%)
1.	Sangat Berhasil	5	100,00%
2.	Berhasil	-	-
3.	Cukup Berhasil	-	-
4.	Tidak Berhasil	-	-

Berdasarkan Keterangan Tabel 3.2 dan 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran dan 5 indikator kinerja utama didapati 5 sasaran dan 5 indikator kinerja utama dalam kriteria penilaian **"sangat berhasil"**.

SASARAN 1 : MENINGKATNYA PDRB SEKTOR INDUSTRI

INDIKATOR : PERSENTASE PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Sasaran Meningkatnya PDRB sektor industri dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan diukur melalui Persentase pertumbuhan PDRB sektor idnsutri berbasis produk olahan Pangan, Sandang, Logam dan Aneka Kerjinan.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.4
Capaian kinerja sasaran meningkatnya PDRB
sektor industri Pengolahan tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	4,78%	10.78%	225.25%

Dari tabel 3.4 diatas realisasi kinerja sasaran meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan dengan Indikator kinerja utama persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan tahun 2023 sebesar 10,78%, jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja eselon II tahun 2023 sebesar 4,78% maka capaian kinerja didapatkan sebesar 225.25%.

Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan ini diperoleh dari kontributor sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Hulu dengan data dan rumusan sebagai berikut :

Tabel 3.5
PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha
dikabupaten kapuas hulu (miliar rupiah) tahun 2021-2022

Lapangan Usaha	2021 (Tahun N-1)	2022 (Tahun N)
Industri Pengolahan	796.240.000.000,00	830.160.000.000,00

source data : BPS Kapuas Hulu (Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka Tahun 2023)

$$PDRB\ Sektor\ Industi\ Pengolahan = \frac{(PDRB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan\ Tahun\ N - PDRB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan\ Tahun\ N - 1)}{PDRB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan\ Tahun\ N - 1} x\ 100\%$$

A. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya :

Tabel 3.6

Analisis atas efisiensi penguna sumber daya tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan	Perencanaan dan pembangunan industri	1.075.938.700	1.073.421.171	99,77%	225,52	125,75%

B. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan Program/kegiatan pada Tahun 2023 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan *output*-nya. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan Peningakatan PDRB sektor industri Pengolahan, program dan kegiatan yang menujang sebagai berikut :

- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja sasaran meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan tahun 2021 dan tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	2021	4,59%	5,16%	112,42%
			2022	4,69%	4,26%	90,83%
			2023	4,78%	10.78%	225.25%

Gambar 3.1
Perkembangan Realisasi dan Capain Kinerja sasaran meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan tahun 2021 sampai dengan 2023

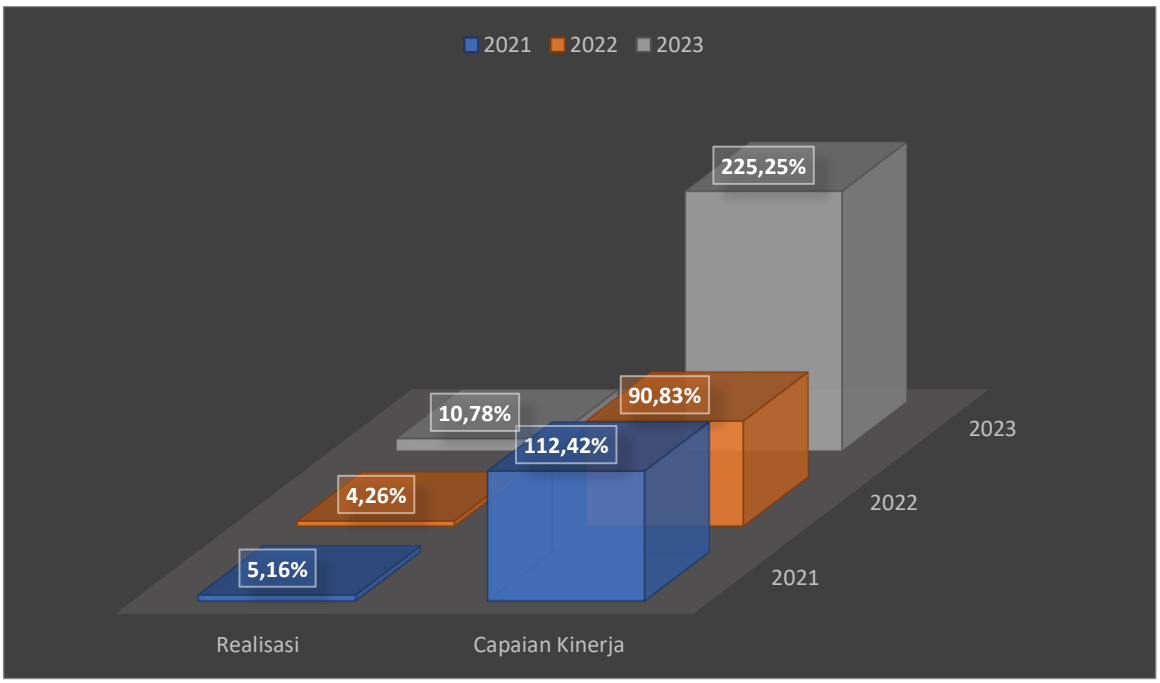

Dari tabel 3.7 dan Gambar 3.1 diatas realisasi dan Capaian kinerja sasaran meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan dengan Indikator kinerja utama persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun lalu (2022) maka realisasi dan capaian kinerja sasaran meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan dengan Indikator kinerja utama persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Tahun 2023 mengalami Kenaikan Realisasi 6.52% dan Capaian sebesar 134,42%.

jika dibandingkan dengan tahun lalu (2021) maka realisasi dan capaian kinerja sasaran meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan dengan Indikator kinerja utama persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Tahun 2023 mengalami Kenaikan Realisasi 5.62% dan Capaian sebesar 112.83%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi :

Tabel 3.8

Perbandingan realisasi Kinerja sasaran meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan tahun 2023 dengan target akhir renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	5,07%	10.78%	212.62%

Tahun 2023 merupakan tahun (Tahun ke-2) Implementasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, dari tabel 3.8 diatas capaian kinerja Sasaran Meningkatnya PDRB

sektor industri Pengolahan dengan indikator kinerja utama Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan sebesar 10.78% bila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu (2026) sebesar 5,07% maka persentase capaian kinerja indikator kinerja utama Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan sampai dengan tahun 2023 sebesar 212.62%

4. Analis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Keberhasilan/peningkatan :

- Bahan baku mudah didapat dari pontesi Daerah;
- Ketersediaan SDM;
- Tenaga kerja yang terampil; dan
- Terdapat banyak varian produk;

Kegagalan/Penurunan :

- Nilai Jual Produk Relatif mahal;
- Kemasan produk olahan kurang menarik; dan
- Belum semua produk yang memilki sertifikat HALAL.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- RPIK Kapuas Hulu belum diperdakan;
- Kurang promosi produk;
- Penjual berdasarkan pesanan; dan
- Pembuatan produk Masih mengunakan alat sederhana;

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Perlu adanya peraturan daerah tentang RPIK untuk menciptakan kepastian Hukum;
- Perlu adanya bimbingan teknis terhadap pelaku IKM dalam memasarkan produk melalu teknologi informasi;

- Perlu adanya pengembang/pemenuhan kapasitas pelaku IKM; dan
- Peningkatan produk dalam negeri;

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
INDIKATOR : PERSENTASE TENAGA KERJA YANG PRODUKTIF

Sasaran Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja utama persentase Tenaga Kerja yang Produktif diukur melalui tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan atau dilatih untuk mengurangi peningkatan angka pencari kerja yang terdaftar dilayanan AK-1 atau kartu pencari kerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.9
Capaian kinerja sasaran meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	13,40%	60.64%	452.54%

Dari tabel 3.9 diatas realisasi kinerja sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja dengan Indikator kinerja utama persentase tenaga kerja yang produktif tahun 2023 sebesar 60,64%, jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja eselon II tahun 2023 sebesar 13,40% maka capaian kinerja didapatkan sebesar 425.54%.

Persentase Tenaga Kerja yang produktif ini diperoleh dari jumlah peserta pelatihan terhadap pencari kerja terdaftar di layanan AK-1. Persentase Tenaga Kerja yang produktif dengan data dan rumusan sebagai berikut :

Tabel 3.10

Peserta Pelatihan dan Pencari Kerja yang terdaftar tahun 2023

Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Pencari Kerja
Kursus Komputer	57 Orang	94 Orang

source data : data bidang tenaga kerja tahun 2023

$$Persentase\ Tenaga\ Kerja\ yang\ Produktif = \frac{Jumlah\ Peserta\ Pelatihan}{Jumlah\ Pencari\ kerja\ yang\ terdaftar\ dilayanan\ AK-1} x\ 100\%$$

A. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya :

Tabel 3.11

Analisis atas efisiensi penguna sumber daya tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	42.988.900	42.988.900	100,00%	452,54%	352.54%

B. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan Program/kegiatan pada Tahun 2023 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan *output*-nya. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan peningakatan terhadap tenaga kerja yang produktif, program dan kegiatan yang menujang sebagai berikut :

- Program Pelatihan Kerjan Dan Produktifitas Tenaga Kerja
- Kegiatan Pelaksana Pelatiahan berdasarkan Unit Kompetensi

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu :

Tabel 3.12
Realisasi Kinerja sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja tahun 2021 dan tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	2021	25.00%	4.10%	16.40%
			2022	9.25%	2.31%	24.92%
			2023	13,40%	60.64%	452.54%

Gambar 3.2
Perkembangan Realisasi dan Capain Kinerja sasaran meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2021 sampai dengan 2023

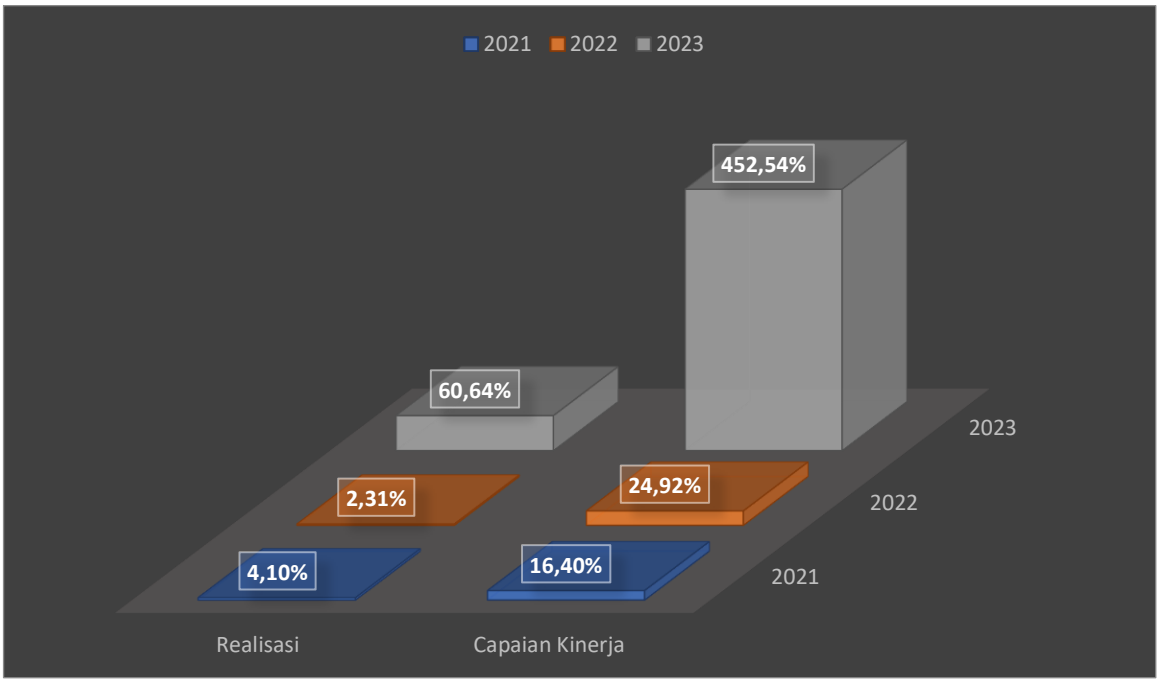

Dari tabel 3.12 dan Gambar 3.2 diatas realisasi dan Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2023 memperoleh realisasi sebesar 60,64% dengan capain kinerja sebesar 452,54%

jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi dan Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2023 mengalami Peningkatan yang Signifikan dengan realisasi Peningkatan sebesar 58,33% dan Peningkatan Capain Kinerja sebesar 467.62%.

jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi dan Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2023 mengalami Peningkatan yang Signifikan dengan realisasi Peningkatan sebesar 56,54 dan Peningkatan Capain Kinerja sebesar 436.14%. Kenaikan/Penurunan Tenaga Kerja yang produktif ini diperoleh dari jumlah peserta pelatihan terhadap pencari kerja terdaftar di layanan AK-1. Jumlah Peserta dan Pencari kerja dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.13

Peserta Pelatihan dan Pencari Kerja yang terdaftar tahun 2021 sampai dengan 2023

Tahun	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Pencari Kerja
2023	Kursus Komputer	57 Orang	94 Orang
2022	**Las Listrik**	8 Orang	347 Orang
2021	**Las Listrik**	5 Orang	366 Orang
	Salon Kecantikan	10 Orang	

source data : data bidang tenaga kerja tahun 2023

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.14
Perbandingan realisasi Kinerja sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja tahun 2023 dengan target akhir renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	20,80%	60.64%	291,53%

Tahun 2023 merupakan tahun ke-II Implementasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, dari tabel 3.14 diatas capaian kinerja sasaran meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dengan Indikator kinerja utama persentase Tenaga Kerja yang Produktif Tahun 2023 sebesar 291,53%

4. Analis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Keberhasilan/peningkatan :

- Telah dilakukan perencanaan terhadap jenis-jenis pelatihan;
- memfasilitasi Pencari Kerja untuk mendapatlkan Pelatihan;
- Pencari Kerja yang terdaftar di Layanan AK-1 tidak sebanding dengan Peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pelatihan.

Kegagalan/Penurunan :

- tidak melakukan pelatihan langsung;
- Minimnya Anggaran Khusus untuk melaksanakan Pelatihan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Minimnya Anggaran untuk melakukan pelatihan;
- Tidak ada LPK yang terakreditasi;
- Tidak ada BLK;

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Adanya Alokasi Anggaran Khusus untuk Melakukan Pelatihan / Memfasilitasi Peserta Pelatihan ke LPK yang terakreditasi;

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN SDM WARGA TRANSMIGARSI

INDIKATOR : PERSENTASE PENINGKATAN WARGA TRANSMIGRASI YANG MANDIRI

transmigrasi untuk meingkatkan perekonomian dalam kategori mandiri.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.15

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	13,02%	13,18%	101,23%

Dari tabel 3.15 diatas realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi dengan Indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri tahun 2023 sebesar 13,18%, jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perjanjian

kinerja eselon II tahun 2023 sebesar 13,02% maka capaian kinerja didapatkan sebesar 101,23%.

Warga transmigrasi yang mandiri ini diperoleh dari pendataan terhadap jumlah KK yang telah diberikan pembinaan, pelatihan, dan bantuan stimulan terhadap warga transmigrasi kabupaten Kapuas Hulu.

Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri dengan data dan rumusan sebagai berikut :

Tabel 3.16

Jumlah KK yang mandiri pada transmigrasi tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah KK yang dibina	KK yang mandiri	Realisasi % Peningkatan
2022	300	31	14,81%
2021	300	27	8,00%
2023	300	39	13.00

source data : data bidang transmigrasi tahun 2023

$$persentase\ peningkatan\ warga\ transmigrasi\ yang\ mandiri = \frac{Jumlah\ KK\ yang\ Mandiri\ Tahun\ N-(N-1)}{Jumlah\ KK\ yang\ Mandiri\ Tahun\ N-1} x\ 100\%$$

A. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya :

Tabel 3.17

Analisis atas efisiensi penguna sumber daya tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	360.090.600	360.075.600	99.996	101,23	1.23%

B. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan Program/kegiatan pada Tahun 2023 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan *output*-nya. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan peningakatan warga transmigrasi yang mandiri program dan kegiatan yang menujang sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu :

Tabel 3.18
Realisasi Kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi tahun 2021 dan tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	2021	9,11	8,00	87,82
			2022	10,42	14,81	142,18
			2023	13,02	13,18	101,23

Gambar 3.3
Perkembangan Realisasi dan Capain Kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi tahun 2021 sampai dengan 2023

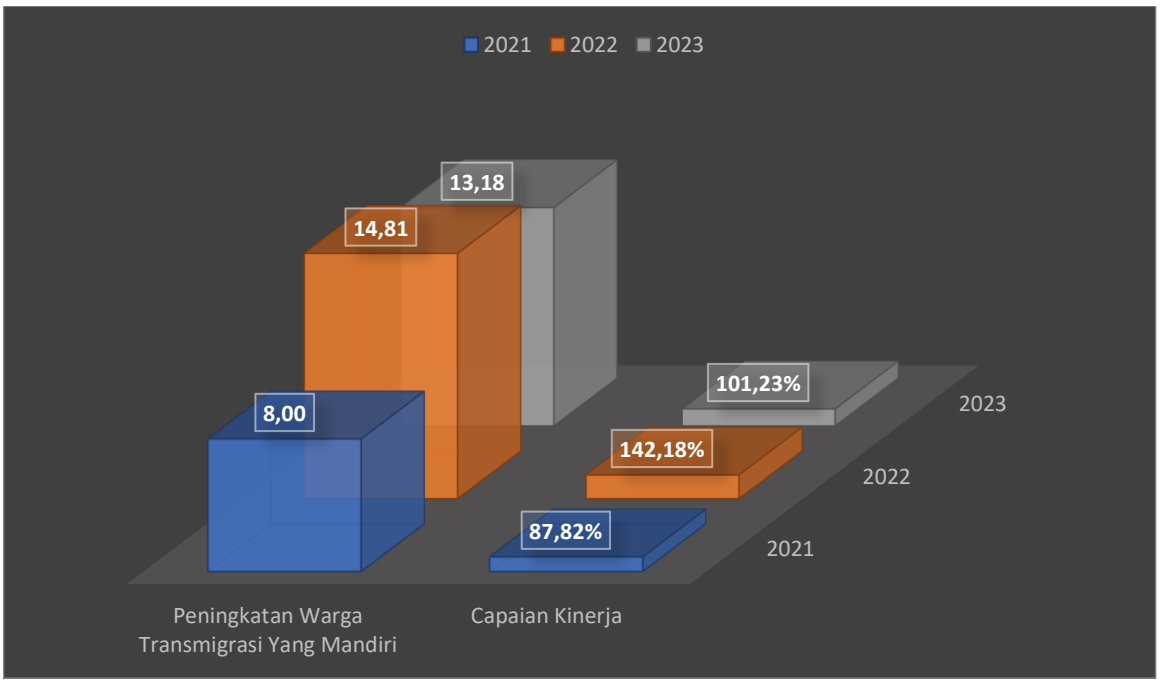

Dari tabel 3.18 dan Gambar 3.3 diatas realisasi dan Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi dengan Indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri Tahun 2023 memperoleh realisasi sebesar 13.18% dengan capain kinerja sebesar 101,23%

jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi dan Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi dengan Indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri Tahun 2023 mengalami Penurunanan dengan realisasi Penurunan sebesar 1,63% dan Penurunan Capain Kinerja sebesar 18,18%.

jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi dan Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi dengan Indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri Tahun 2023 mengalami Peningkatan dengan realisasi Peningkatan sebesar 5,18 dan Peningkatan Capain Kinerja sebesar 13,41%. %. Kenaikan Warga Transmigrasi yang Mandiri ini diperoleh peningkatan jumlah kk yang mandiri terhadap jumlah kk yang dibina pada upt binaan, jumlah kk yang mandiri terhadap jumlah kk yang dibina pada upt binaan dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.19

Jumlah KK yang mandiri pada transmigrasi tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah KK yang dibina	KK yang mandiri	Peningkatan KK yang mandiri	Realisasi
2023	300			
2022	300	31	4	14,81%
2021	300	27	2	8,00%
2020	-	25	-	-

source data : data bidang transmigrasi tahun 2023

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.20
Perbandingan realisasi Kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi tahun 2023 dengan target akhir renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	20,83%	13,18	63,27

Tahun 2023 merupakan tahun ke-II Implementasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, dari tabel 3.20 diatas capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi dengan Indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri Tahun 2023 sebesar 13,18% bila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu (2026) sebesar 20,83% maka Sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi dengan Indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri Tahun 2023 Sebesar 63,27.

4. Analis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Keberhasilan/peningkatan :

- Telah dilakukan perencanaan terhadap jenis-jenis pelatihan;
- Telah dilakukan Pembinaan, pelatihan bantuan;

- Tingkat Pendapatan Warga Transmigrasi terhadap penjualan komoditas unggulan meningkat;

Kegagalan/Penurunan :

- -

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Minimnya Anggaran untuk melakukan pembinaan, pelatihan, bantuan;
- Jumlah KK yang dilakukan pembinaan, pelatihan, bantuan tidak sebanding dengan jumlah KK yang ada;
- Infrastruktur Minim;

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Melakukan kerja sama dengan pihak ke 3.

SASARAN 4	**:**	**MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH**
INDIKATOR	**:**	**PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH**

Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja utama predikat sakip perangkat daerah diukur melalui komponen-komponen penilai terhadap Implementasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun N-1

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.21
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun N-1 (2022)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	B	B	100,00%
				Rata-rata capaian kinerja	100.00%

source data: Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

Dari tabel 3.21 diatas realisasi kinerja Sasaran meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja utama predikat sakip perangkat daerah, predikat sakip perangkat daerah dinas tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi kabupaten Kapuas hulu tahun 2023 berdasarkan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022 dengan nomor LHE : 700.1.2.7/118/LHE/INKAB/IB4 pada dinas tenaga kerja, perindustrian dan tansmigrasi kabupaten kapuas hulu dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh dengan nilai sebesar 60.36 (hasil dari LKE-Lembar Kinerja Evaluasi). Perolehan nilai tersebut termasuk dalam kategori **B** dengan interpretasi ***(AKIP sudah baik 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama).*** Jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja eselon II tahun 2023 dengan Predikat B, maka, persentase capaian indikator kinerja predikat sakip perangkat daerah dinas tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi kabupaten Kapuas hulu tahun 2023 sebesar 100.00% dalam kategori Capaian kinerja **"Sangat Berhasil".**

A. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya :

Tabel 3.22

Analisis atas efisiensi penguna sumber daya tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77.436.000	77.109.375	99,58	100.00%	0.42%

source data : Bagian Program Disnakerintrans Tahun 2023

B. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan Program/kegiatan pada Tahun 2023 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan *output*-nya. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan peningakatan Implementasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, program dan kegiatan yang menujang sebagai berikut :

- Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu :

Tabel 3.23

Realisasi Kinerja sasaran sasaran Meningkatnya Penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	2021	BB	BB	100.00
			2022	BB	BB	100.00
			2023	B	B	100.00

source data: Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2023

Gambar 3.4

Perkembangan Realisasi Nilai Sakip 2021 sampai dengan 2023

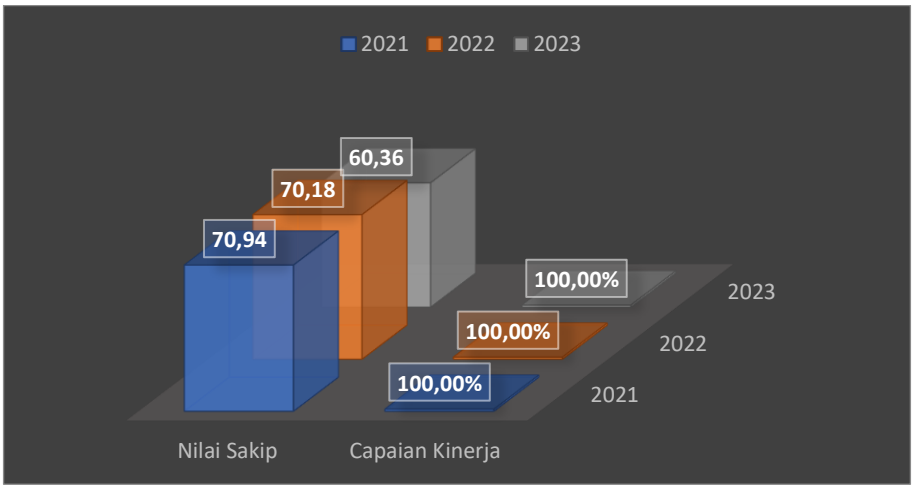

Dari tabel 3.23 dan Gambar 3.4 diatas realisasi dan Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja utama Predikat Nilai Sakip Perangkat Derah Tahun 2023 berdasarkan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Tahun 2022 dengan nomor LHE : 700.1.2.7/118/LHE/INKAB/IB4 memperoleh nilai sebesar 60.36 (B).

jika dibandingkan dengan tahun 2022 berdasarkan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Tahun 2021 dengan nomor LHE : 700/163/LHE/INKAB/IB4 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu mengalami penurunan Nilai sebesar 9.82 Point dari Nilai yang semula Tahun 2022 sebesar 70.18 (BB).

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.24

Perbandingan realisasi Kinerja sasaran meningkatnya Penyelenggaraan Akutabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2023 dengan target akhir renstra tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	BB (74.00)	B (60.36)	81.57%

source data : Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

Tahun 2023 merupakan tahun ke-2 Implementasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, Sasaran Meningkatnya Penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur melalu indikator kinerja utama yaitu predikat sakip perangkatdaerah, predikat sakip perangkat daerah dinas tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi kabupaten Kapuas hulu tahun 2023 berdasarkan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Tahun 2022 dengan nomor LHE : 700.1.2.7/118/LHE/INKAB/IB4 memperoleh nilai sebesar 60.36 (B), Jika dibandingkan dengan target akhir rencana Strategis dinas tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi kabupaten Kapuas hulu

tahun 2026 dengan Predikat Sakip Perangkat Daerah 74.00 (BB) maka, persentase capaian indikator kinerja predikat sakip perangkat daerah dinas tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi kabupaten Kapuas hulu sampai dengan tahun 2023 sebesar 81.57%

4. Analis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Keberhasilan/peningkatan :

- Pemenuhan Dokumen SAKIP Tahun 2023 Lebih Lengkap jika dibandingkan Tahun 2022

Kegagalan/Penurunan :

- Sistem Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Mengunakan Metode Terbaru
- Tidak ada reward and punishment;

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Beberapa ASN belum mengerti Penerapan SAKIP;
- SDM Minim (Tidak ada ASN yang menduduki Jabatan Akuntabilitas Kinerja;
- Pemenuhan data bidang/urusan sering mengalami keterlambatan dan tidak lengkap;
- Sarana dan Prasarana Penunjang Implementasi Sakip Minim;
- Tidak Ada SK Tim SAKIP.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Sosialisasi SAKIP;
- Penambahan ASN Khusus Jabatan Akuntabilitas Kinerja;
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana;
- Pembentukan SK Tim SAKIP.

SASARAN 5 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah diukur melalui suvei terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan kartu AK-1

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.25

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas pelayanan publik perangkat daerah tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah	95,50	93,64	98,05%

Dari tabel 3.25 diatas realisasi kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2023 sebesar 93,64%, jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja eselon II tahun 2023 sebesar 95,50% maka capaian kinerja didapatkan sebesar 98,05%.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah ini diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan kartu AK-1, hasil survey kepuasan masyrakat terhadap

pelayanan pembuatan kartu AK-1 dengan data dan rumusan sebagai berikut :

Tabel 3.26

Hasil Survei kepuasan Masrakat terhadap pelayanan pembuatan kartu AK-1 Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Persayaratan Pelayanan	3.774
2	Prosedur Pelayanan	3.774
3	Waktu Pelayanan	3.742
4	Biaya/Tarif Pelayanan	4.000
5	Produk Jenis Pelayanan	3.548
6	Kompetensi Pelaksana	3.677
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3.677
8	Sarana dan Prasarana	3.677
9	Penanganan Pengaduan dan Saran	3.839
	Nilai Indeks	3,746
	Nilai Konversi SKM	93,64
	Mutu Pelayanan	A
	Kinerja Pelayanan	Sangat Baik

A. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya :

Tabel 3.27

Analisis atas efisiensi penguna sumber daya tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.464.442.886	5.137.504.998	100,00%	98,05%	4,03%

B. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan Program/kegiatan pada Tahun 2023 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan *output*-nya. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan Peningakatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, program dan kegiatan yang menujang sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu :

Tabel 3.28
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2021 dan tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2021	97,00	97,00	100.00
			2022	95,00	95,00	100.00
			2023	95,50	93,64	98,05

Gambar 3.5
Perkembangan Realisasi dan Capain Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2021 sampai dengan 2023

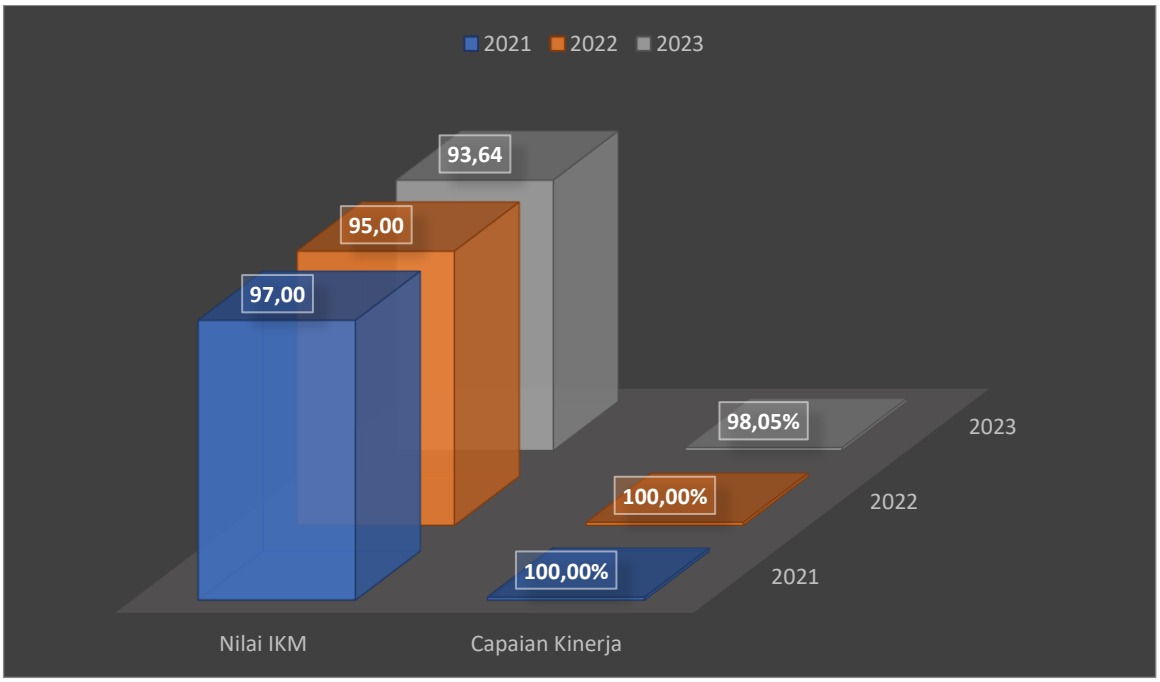

Dari tabel 3.28 dan Gambar 3.1 diatas realisasi dan Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun lalu 2022 maka realisasi dan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2023 mengalami Penurunan Realisasi sebesar 1.36% dan Capaian kinerja mengalami Penurunan sebesar 1.95%.

jika dibandingkan dengan tahun lalu 2021 maka realisasi dan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2023 mengalami Penurunan Realisasi sebesar 3.36% dan Capaian kinerja mengalami Penurunan sebesar 1.95%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi :

Tabel 3.29
Perbandingan realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2023 dengan target akhir renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah	97,00%	93,64%	96.53%

Tahun 2023 merupakan tahun ke-II Implementasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, dari tabel 3.29 diatas capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator kinerja utama Indeks KepuasanMasyarakat Terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebesar 93,64% bila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun (2026) sebesar 97,00% maka persentase capaian kinerja indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 sebesar 96,53%.

4. Analis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Keberhasilan/peningkatan :

- Nilai Unsur Pelayanan meningkat;

Kegagalan/Penurunan :

- Sarana dan Prasarana Pelayanan Masih Minim;
- SDM minim;

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Sarana dan Prasarana Pelayanan Masih Minim;
- SDM minim;

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Peningkatan Kapasitas Pelayanan;
- Sarana dan Prasarana;

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Perubahan (DPPA) tanggal 1 November 2023 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Sebesar **Rp. 7.077.908.586,00,-** dengan Realisasi Anggaran Sebesar **Rp. 6.748.111.294,00,-** SILPA/Sisa Lebih sebesar **Rp. 329.797.292,00,-** Dengan Capaian Realisasi Anggaran sebesar **95.34%.**

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**5.641.879.286**	**5.314.614.773**	**94,20%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**5.541.878.886**	**5.214.614.373**	**94,09%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**77.436.000**	**77.109.375**	**99,58%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.933.000	15.683.600	98,43%

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.759.000	4.759.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.759.000	4.759.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.759.000	4.759.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.759.000	4.759.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.136.500	10.095.100	99,59%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.330.500	32.294.675	99,89%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.813.131.716**	**3.488.522.274**	**91,49%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.588.668.016	3.270.254.349	91,13%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.500.000	2.500.000	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.160.000	190.143.750	96,93%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.369.300	8.272.975	98,85%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.500.400	1.500.400	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.934.000	13.855.700	99,44%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	1.995.100	99,76%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**37.000.000**	**36.841.200**	**99,57%**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18.500.000	18.420.850	99,57%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.500.000	18.420.350	99,57%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**711.019.200**	**710.911.550**	**99,98%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.021.800	30.021.800	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.032.000	49.928.150	99,79%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.229.000	25.229.000	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.079.000	38.075.200	99,99%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	567.657.400	567.657.400	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**687.398.570**	**685.397.974**	**99,71%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.029.000	74.209.034	97,61%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	608.869.570	608.688.940	99,97%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**215.893.400**	**215.832.000**	**99,97%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.204.400	170.204.400	100,00%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.850.000	8.788.600	99,31%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.839.000	36.839.000	100,00%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**42.988.900**	**42.988.900**	100,00%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**30.132.400**	**30.132.400**	**100,00%**
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	30.132.400	30.132.400	100,00%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**12.856.500**	**12.856.500**	**100,00%**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.856.500	12.856.500	100,00%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**18.036.500**	**18.036.500**	100,00%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**18.036.500**	**18.036.500**	**100,00%**
Pelayanan antar Kerja	18.036.500	18.036.500	100,00%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**38.975.000**	**38.975.000**	100,00%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**38.975.000**	**38.975.000**	**100,00%**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.614.000	24.614.000	100,00%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.361.000	14.361.000	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**1.075.938.700**	**1.073.421.171**	**99,77%**
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**1.075.938.700**	**1.073.421.171**	99,77%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**1.075.938.700**	**1.073.421.171**	**99,77%**
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	675.938.700	675.456.800	99,93%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	400.000.000	397.964.371	99,49%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**360.090.600**	**360.075.350**	**100,00%**
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**360.090.600**	**360.075.350**	100,00%
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**227.339.600**	**227.339.600**	**100,00%**
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.339.600	227.339.600	100,00%

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**132.751.000**	**132.735.750**	**99,99%**
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	**132.751.000**	**132.735.750**	**99,99%**
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	132.751.000	132.735.750	99,99%
JUMLAH	**7.077.908.586**	**6.748.111.294**	**95,34%**

BAB IV
PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, keberhasilan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 tercermin melalui pencapaian sasaran strategis organisasi yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah 5 (Lima) indikator dengan Rata-Rata Capaian Kinerja sebesar 195.47% Pencapaian ini dikategorikan **"SANGAT BERHASIL"**, walaupun ada satu Indikator Kinerja Utama yang realisasinya tidak mencapai target, nampu secara Persentase Capain Kinerja tersebut dalam Kategori Sangat Berhasil. penyerapan anggaran keberhasilan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 mencapai 95,34%, dengan Tidak terserapnya anggaran yang sebesar 4.66% tersebut merupakan hasil EFISIENSI anggaran mengingat seluruh kinerja impact dan outcome telah tercapai dan hampir seluruh kinerja output telah tercapai. Dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2023 muncul beberapa permasalahan/hambatan. Meskipun begitu beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif masih tetap diperlukana atas segala kemungkinan- kemungkinan masalah/hambatan yang mungkin timbul dimasa datang, sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 telah kami susun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, Maret 2023
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja Eselon II ;
2. Perjanjian Kinerja Eselon II ;
3. Perjanjian Kinerja Eselon III;
4. Perjanjian Kinerja Eselon IV; dan
5. Perjanjian Kinerja Fungsional Tertentu/Sub Koordinasi.

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	% CAPAIAN KINERJA	TARGET ANGGARAN (DPPA 01 November 2023)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	% CAPAIAN ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PALAYANAN DASAR										
2.07	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	Predikat	Tahun	B	B	100,00	77.436.000	77.109.375	99,58
					Tw I	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
					Tw II	0,00	B	0,00	23.622.500	23.622.500	100,00
					Tw III	B	0,00	0,00	14.656.800	14.656.800	100,00
					Tw IV	0,00	0,00	0,00	39.156.700	38.830.075	99,17
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Perangkat Daerah	Score	Tahun	95,50	93,64	98,05	5.464.442.886	5.137.504.998	94,02
					Tw I	0,00	0,00	0,00	952.507.484	952.507.484	100,00
					Tw II	0,00	0,00	0,00	1.778.949.056	1.778.949.056	100,00
					Tw III	0,00	0,00	0,00	1.053.887.440	1.053.887.440	100,00
					Tw IV	95,50	93,64	98,05	1.679.098.906	1.352.161.018	80,53
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	%	Tahun	13,40	60,64	452,54	100.000.400	100.000.400	100,00
					Tw I	0,00	0,00	0,00	67.680.900	34.341.700	50,74
					Tw II	0,00	0,00	0,00	21.604.167	43.817.400	202,82
					Tw III	0,00	0,00	0,00	8.148.000	5.170.000	63,45
					Tw IV	13,40	60,64	452,54	2.567.333	16.671.300	649,36
3	URUSAN PILIHAN										
3.31	PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	Tahun	4,78	10,78	225,52	1.075.938.700	1.073.421.171	99,77
					Tw I	0,00	0,00	0,00	113.516.500	99.882.800	87,99
					Tw II	0,00	0,00	0,00	142.068.200	190.340.200	133,98
					Tw III	0,00	0,00	0,00	776.261.000	30.240.000	3,90
					Tw IV	4,78	10,78	225,52	44.093.000	752.958.171	1707,66

KODE	URUSAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	% CAPAIAN KINERJA	TARGET ANGGARAN (DPPA 01 November 2023)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	% CAPAIAN ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.32	TRANSMIGRASI	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	%	Tahun	13,02	13,18	101,23	360.090.600	360.075.350	99,996
					Tw I	3,97	3,26	82,19	30.841.200	15.133.400	49,07
					Tw II	5,15	5,00	97,03	53.507.000	59.610.200	111,41
					Tw III	3,11	3,00	96,51	92.841.200	68.716.400	74,01
					Tw IV	0,79	1,92	242,89	182.901.200	216.615.350	118,43
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI								195,4"			
JUMLAH ANGGARAN DAN SERAPAN ANGGARAN									7.077.908.586	6.748.111.294,00	95,34

Putussibau, ... Desember 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199003 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Jabatan	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	FRANSISKUS DIAAN, S.H.,M.H
Jabatan	:	Bupati Kapuas Hulu

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dalam Lampiran perjanjian ini, rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
BUPATI KAPUAS HULU,	KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU,
FRANSISKUS DIAAN, S.H.,M.H.	ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19671105 199003 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	4,78 %
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	13,40 %
3	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	13,02 %
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	B
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Perangkat Daerah	Score 95,50

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.541.878.886	APBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	42.988.900	APBD
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	18.036.500	APBD
4	Program Hubungan Industrial	38.975.000	APBD
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.075.938.700	APBD
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	227.339.600	APBD
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	132.751.000	APBD
JUMLAH		**7.077.908.586**	**APBD**

Putussibau, November 2023

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.,M.H.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199003 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	H.M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Jabatan	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan langsung **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU,	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU,
ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si	H.M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si
Pembina Utama Muda	Pembina TK.I
NIP. 19671105 199003 2 010	NIP. 19690704 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai 72,00
2	Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	95,50 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.436.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.813.131.716	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.000.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	711.019.200	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687.398.570	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.893.400	APBD
JUMLAH		**5.541.878.886**	**APBD**

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199003 2 010

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

H.M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19690704 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	DETY PUTRI SARI, S.Pi
Jabatan	:	Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	H. M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan langsung **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA. PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU,	PERENCANA AHLI MUDA,
H. M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si	DETY PUTRI SARI, S.Pi
Pembina TK.I	Penata
NIP. 19690704 199703 1 003	NIP. 19871223 201402 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terselesaikan**	**23 Dokumen**
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencananaan Perangkat Daerah	14 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
7	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
8	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.933.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.759.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.759.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.759.000	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.759.000	APBD

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.136.500	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.330.500	APBD
JUMLAH		**77.436.000**	**APBD**

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

H. M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19690704 199703 1 003

Pihak Pertama,

PERENCANA AHLI MUDA,

DETY PUTRI SARI, S.Pi
Penata
NIP. 19871223 201402 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	NURMANSYAH, S.E
Jabatan	:	Analis Kebijakan Ahli Muda

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	H. M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan langsung **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA. PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA.
H. M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si	NURMANSYAH, S.E
Pembina TK.I	Penata TK.I
NIP. 19690704 199703 1 003	NIP. 19750422 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan**	**12 Laporan**
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan
3	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	460 Dokumen
4	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
6	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen
7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan
8	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.588.667.546	APBD
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.500.000	APBD
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.160.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.369.300	APBD
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.500.400	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.934.000	APBD

7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	APBD
JUMLAH		**3.813.131.716**	**APBD**

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

H. M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19690704 199703 1 003

Pihak Pertama,

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

NURMANSYAH, S.E
Penata TK.I
NIP. 19750422 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURMANSYAH, S.E
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan langsung **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU,	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR,
H. M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si	NURMANSYAH, S.E
Pembina TK.I	Penata TK.I
NIP. 19690704 199703 1 003	NIP. 19750422 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terselesaikan**	**12 Laporan**
2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen
4	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan**	**12 Laporan**
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
8	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460 Laporan
10	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terselesaikan**	**12 Laporan**
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
14	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terselesaikan**	**12 Laporan**
15	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit

16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit
17	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18.500.000	APBD
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.500.000	APBD
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.021.800	APBD
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.032.000	APBD
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.229.000	APBD
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.079.000	APBD
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	567.657.400	APBD
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	APBD
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.029.000	APBD
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	608.869.570	APBD
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.204.400	APBD
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.850.000	APBD
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.839.000	APBD
JUMLAH		**1.651.311.170**	**APBD**

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU,

H. M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag.,M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19690704 199703 1 003

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR,

NURMANSYAH, S.E
Penata TK.I
NIP. 19750422 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	BAHARUDIN, S.E.,M.M
Jabatan	:	Kepala Bidang Tenaga Kerja

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Jabatan	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan langsung **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU,	KEPALA BIDANG TENAGA KERJA,
ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si	BAHARUDIN, S.E.,M.M
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 19671105 199003 2 010	NIP. 19760721 199903 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan	Persentase Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	100,00%
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja yang terlatih	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang difasilitasi	26,32 %
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100,00 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	30.132.400	APBD
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.856.500	APBD
3	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	18.036.500	APBD
4	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	38.975.000	APBD
JUMLAH		**100.000.400**	**APBD**

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199003 2 010

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG TENAGA KERJA,

BAHARUDIN, S.E.,M.M
Pembina
NIP. 19760721 199903 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dra. SAMSINAR
Jabatan	:	Kepala Bidang Perindustrian

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Jabatan	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan langsung **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU,	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,
ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si	Dra. SAMSINAR
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 19671105 199003 2 010	NIP. 19680502 199401 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Pengolahan	5,51 %
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Sektor industri	Persentase Pertumbuhan Investasi IKM	4,33 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.075.938.700	APBD
JUMLAH		1.075.938.700	**APBD**

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199003 2 010

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,

Dra. SAMSINAR
Pembina
NIP. 19680502 199401 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJAHIDIN, S.E
Jabatan : Penyuluh Perindustrian Ahli Muda

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dra. SAMSINAR
Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian

selaku atasan langsung **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,	PENYULUH PERINDUSTRIAN AHLI MUDA,
Dra. SAMSINAR	MUJAHIDIN, S.E
Pembina	Penata TK.I
NIP. 19680502 199401 2 001	NIP. 19691113 200701 1 028

PERJANJIAN KINERJA PERUNAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK yang diperdakan	1 Dokumen
2	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	188.282.500	APBD
JUMLAH		**188.282.500**	**APBD**

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,

Dra. SAMSINAR
Pembina
NIP. 19680502 199401 2 001

Pihak Pertama,

PENYULUH PERINDUSTRIAN AHLI MUDA,

MUJAHIDIN, S.E
Penata TK.I
NIP. 19691113 200701 1 028

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SUCI HARIANSYAH, S.E
Jabatan	:	Penyuluh Perindustrian Ahli Muda

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	Dra. SAMSINAR
Jabatan	:	Kepala Bidang Perindustrian

selaku atasan langsung **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,	PENYULUH PERINDUSTRIAN AHLI MUDA,
Dra. SAMSINAR	SUCI HARIANSYAH, S.E
Pembina	Penata TK.I
NIP. 19680502 199401 2 001	NIP. 19731028 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK yang diperdakan	1 Dokumen
2	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	13 Dokumen
3	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	487.656.200	APBD
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	400.000.000	APBD
JUMLAH		**887.656.200**	**APBD**

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,

Dra. SAMSINAR
Pembina
NIP. 19680502 199401 2 001

Pihak Pertama,

PENYULUH PERINDUSTRIAN AHLI MUDA,

SUCI HARIANSYAH, S.E
Penata TK.I
NIP. 19731028 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASNUL SHABRI, S.P.,M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan langsung **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199003 2 010

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI,

HASNUL SHABRI, S.P.,M.Sc
Pembina
NIP. 19850519 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Terbangun	N/A
2	Tersedianya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan/Bina	15,00 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.339.600	APBD
2	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	132.751.000	APBD
JUMLAH		**360.090.600**	**APBD**

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199003 2 010

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI,

HASNUL SHABRI, S.P.,M.Sc
Pembina
NIP. 19850519 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SANGKUDAN, S.S.T
Jabatan	:	Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	HASNUL SHABRI, S.P.,M.Sc
Jabatan	:	Kepala Bidang Transmigrasi

selaku atasan langsung **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI,	PERENCANA AHLI MUDA,
HASNUL SHABRI, S.P.,M.Sc	SANGKUDAN, S.S.T
Pembina	Penata TK.I
NIP. 19850519 200902 1 001	NIP. 19690821 198901 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi**	**Jumlah Dokumen Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi**	**1 Dokumen**
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.339.600	APBD
JUMLAH		**227.339.600**	**APBD**

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI,

HASNUL SHABRI, S.P.,M.Sc
Pembina
NIP. 19850519 200902 1 001

Pihak Pertama,

PERENCANA AHLI MUDA,

SANGKUDAN, S.S.T
Penata TK.I
NIP. 19690821 198901 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SYAMSUDDIN, S.K.M
Jabatan	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	HASNUL SHABRI, S.P.,M.Sc
Jabatan	:	Kepala Bidang Transmigrasi

selaku atasan langsung **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI,	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA,
HASNUL SHABRI, S.P.,M.Sc	SYAMSUDDIN, S.K.M
Pembina	Penata TK.I
NIP. 19850519 200902 1 001	NIP. 19690122 198912 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Tersedianya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan pada tahap Kemandirian**	**4 Satuan Permukiman**
2	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	4 Satuan Permukiman

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	132.751.000	APBD
JUMLAH		**132.751.000**	**APBD**

Putussibau, November 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI,

HASNUL SHABRI, S.P.,M.Sc
Pembina
NIP. 19850519 200902 1 001

Pihak Pertama,

PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT AHLI MUDA,

SYAMSUDDIN, S.K.M
Penata TK.I
NIP. 19690122 198912 1 002